

GEOPOLITIK AIR DAN KELEMBAGAAN REGIONAL: MEDIASI AFRICAN UNION DALAM SENGKETA BENDUNGAN ANTARA ETHIOPIA DAN MESIR

Dinda Rolisti¹, Wulan Yuliani², Revalica Putri Sunarsri³

^{1,2,3}Universitas Maritim Raja Ali Haji, Tanjungpinang, Indonesia

Email: dindarolisti23@gmail.com

Abstrak

Sungai Nil menjadi sumber kehidupan vital bagi negara-negara di Afrika Timur dan Utara, khususnya Mesir dan Ethiopia. Pembangunan *Grand Ethiopian Renaissance Dam* (GERD) oleh Ethiopia sejak tahun 2011 telah memicu ketegangan geopolitik dengan Mesir, yang menganggap proyek tersebut mengancam hak historisnya atas Sungai Nil. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif berbasis studi literatur untuk menganalisis dinamika geopolitik, peran African Union (AU) dalam proses mediasi, serta interpretasi konflik ini melalui perspektif teori realisme hubungan internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya mediasi AU dari tahun 2015 hingga 2025 belum menghasilkan kesepakatan hukum yang mengikat, karena kedua negara lebih mengutamakan kepentingan nasional masing-masing dibandingkan kerja sama regional. Konflik ini mencerminkan karakteristik realisme di mana negara bertindak untuk mempertahankan survival dan mengamankan sumber daya strategis. Diperlukan mekanisme kerja sama dan pengawasan yang lebih kuat dari organisasi regional untuk mencegah eskalasi lebih lanjut.

Kata Kunci: Grand Ethiopian Renaissance Dam, Sungai Nil, African Union, Realisme, Geopolitik Air.

Abstract

The Nile River is a vital source of life for countries in East and North Africa, especially Egypt and Ethiopia. The construction of the Grand Ethiopian Renaissance Dam (GERD) by Ethiopia since 2011 has sparked geopolitical tensions with Egypt, which considers the project to threaten its historical rights to the Nile River. This study uses a descriptive qualitative approach based on literature studies to analyze geopolitical dynamics, the role of the African Union (AU) in the mediation process, and the interpretation of this conflict through the perspective of the theory of international relations realism. The results show that the AU mediation efforts from 2015 to 2025 have not produced a binding legal agreement, because both countries prioritize their respective national interests over regional cooperation. This conflict reflects the characteristics of realism where countries act to maintain survival and secure strategic resources. Stronger cooperation and oversight mechanisms are needed from regional organizations to prevent further escalation.

Keywords: Grand Ethiopian Renaissance Dam, Nile River, African Union, Realism, Water Geopolitics

A. PENDAHULUAN

Sungai Nil merupakan salah satu sungai paling berpengaruh dalam sejarah peradaban dunia dan dikenal sebagai sungai terpanjang di dunia dengan panjang mencapai sekitar 6.650 kilometer. Sungai ini membentang dari kawasan Afrika Timur hingga Afrika Utara dan melewati wilayah yang memiliki karakteristik geografis, sosial, serta politik yang beragam.

Aliran Sungai Nil mencakup 11 negara di kawasan Afrika, yaitu Ethiopia, Mesir, Tanzania, Uganda, Rwanda, Burundi, Republik Demokratik Kongo, Kenya, Eritrea, Sudan Selatan, dan Sudan. Sungai ini memiliki dua anak sungai utama, yaitu Nil Putih (White Nile) yang berasal dari wilayah Great Lakes Afrika dan Nil Biru (Blue Nile) yang berhulu dari Danau Tana di Ethiopia. Kedua aliran tersebut kemudian bertemu di Khartoum, Sudan, sebelum melanjutkan perjalanan menuju Mesir dan bermuara di Laut Mediterania.

Keberadaan Sungai Nil memiliki arti strategis yang sangat besar, terutama bagi negara-negara yang bergantung pada sumber daya air tersebut. Sejak masa peradaban Mesir kuno, Sungai Nil telah menjadi pusat kehidupan masyarakat karena menyediakan kebutuhan air untuk pertanian, konsumsi, transportasi, serta mendukung perkembangan ekonomi. Hingga saat ini, Sungai Nil tetap menjadi sumber daya vital bagi jutaan masyarakat di kawasan Afrika Timur Laut. Ketergantungan yang tinggi terhadap Sungai Nil menjadikan pengelolaan sumber daya air sungai ini tidak hanya menjadi persoalan lingkungan, tetapi juga berkembang menjadi isu politik dan keamanan internasional. Hal tersebut disebabkan oleh adanya perbedaan kepentingan antarnegara yang berada di sepanjang aliran Sungai Nil, khususnya antara negara hulu dan negara hilir.

Salah satu negara yang memiliki posisi penting dalam dinamika Sungai Nil adalah Ethiopia. Ethiopia merupakan negara yang terletak di kawasan Tanduk Afrika dan termasuk dalam wilayah Afrika Timur. Negara ini berbatasan dengan Eritrea di bagian utara, Djibouti dan Somalia di sebelah timur, Kenya di bagian selatan, serta Sudan dan Sudan Selatan di bagian barat. Ethiopia memiliki peran strategis dalam sistem Sungai Nil karena menjadi sumber utama aliran Nil Biru, salah satu cabang terbesar yang menyumbang sebagian besar debit air menuju Sungai Nil di Mesir. Kondisi geografis tersebut membuat Ethiopia memiliki kepentingan besar dalam memanfaatkan sumber daya air Sungai Nil untuk mendukung pembangunan nasional, terutama dalam bidang energi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Namun, pemanfaatan Sungai Nil oleh Ethiopia menjadi sumber ketegangan dengan Mesir, negara yang berada di wilayah Afrika Utara dan sangat bergantung terhadap aliran Sungai Nil. Salah satu faktor utama yang menyebabkan konflik antara kedua negara adalah pembangunan Grand Ethiopian Renaissance Dam (GERD) yang mulai dibangun oleh Ethiopia pada tahun 2011 di wilayah aliran Nil Biru. Bendungan tersebut dirancang sebagai proyek pembangkit listrik tenaga air terbesar di Afrika yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas energi Ethiopia, mempercepat pembangunan ekonomi, serta mengurangi ketergantungan terhadap sumber energi lain. Bagi Ethiopia, pembangunan GERD merupakan simbol kedaulatan dan strategi pembangunan nasional untuk memanfaatkan sumber daya alam yang berada dalam wilayahnya sendiri.

Di sisi lain, Mesir memandang pembangunan GERD sebagai ancaman terhadap keamanan air nasionalnya. Sebagai negara hilir, Mesir memiliki tingkat ketergantungan yang sangat tinggi terhadap Sungai Nil karena sebagian besar kebutuhan air domestik, pertanian, dan industrinya berasal dari sungai tersebut. Pemerintah Mesir berpendapat bahwa pengoperasian bendungan tanpa adanya kesepakatan yang jelas mengenai pengisian dan pengelolaan bendungan dapat mengurangi jumlah air yang diterima oleh Mesir. Kekhawatiran tersebut juga berkaitan dengan adanya klaim hak historis atas penggunaan Sungai Nil berdasarkan Perjanjian 1929 dan Perjanjian 1959 yang memberikan porsi besar pemanfaatan air kepada Mesir dan Sudan. Akan tetapi, Ethiopia menolak perjanjian tersebut karena dianggap tidak melibatkan negara-negara hulu dan tidak mencerminkan prinsip keadilan dalam pembagian sumber daya air.

Perselisihan mengenai GERD menunjukkan bahwa konflik Sungai Nil bukan hanya berkaitan dengan persoalan teknis mengenai pengelolaan air, tetapi juga mencerminkan persaingan kepentingan nasional dan dinamika geopolitik di kawasan Afrika. Air dalam konteks ini menjadi sumber daya strategis yang berkaitan langsung dengan keamanan nasional

suatu negara. Ethiopia berupaya memperkuat posisi dan kemandirian ekonominya melalui pembangunan infrastruktur energi, sementara Mesir berusaha mempertahankan akses terhadap sumber daya air yang dianggap sebagai kebutuhan vital bagi keberlangsungan negaranya. Perbedaan kepentingan tersebut menyebabkan proses negosiasi antara Ethiopia, Mesir, dan Sudan berjalan cukup panjang serta mengalami berbagai hambatan.

Dalam upaya mencari penyelesaian konflik, organisasi regional Afrika yaitu African Union (AU) memiliki peran penting sebagai mediator yang berusaha mendorong dialog dan penyelesaian secara damai antara negara-negara yang bersengketa. AU berupaya memfasilitasi berbagai pertemuan trilateral antara Ethiopia, Mesir, dan Sudan untuk mencapai kesepakatan mengenai pengisian serta pengoperasian GERD. Keterlibatan AU menunjukkan bahwa konflik sumber daya alam di kawasan Afrika tidak hanya menjadi perhatian negara yang bersangkutan, tetapi juga menjadi isu regional yang membutuhkan mekanisme kerja sama dan diplomasi multilateral. Meskipun demikian, berbagai upaya mediasi yang dilakukan hingga saat ini belum sepenuhnya menghasilkan kesepakatan permanen karena masih terdapat perbedaan mendasar terkait hak penggunaan air dan kepentingan nasional masing-masing negara.

Untuk memahami dinamika konflik tersebut, teori Realisme dalam hubungan internasional dapat digunakan sebagai pendekatan analisis. Perspektif realisme memandang bahwa negara merupakan aktor utama dalam sistem internasional yang berusaha mempertahankan kepentingan nasional, keamanan, dan kekuasaannya. Dalam perspektif ini, tindakan Ethiopia dan Mesir dapat dipahami sebagai bentuk upaya mempertahankan kepentingan nasional masing-masing. Ethiopia melihat GERD sebagai instrumen untuk meningkatkan kekuatan ekonomi dan pembangunan nasional, sedangkan Mesir melihat pengamanan akses terhadap Sungai Nil sebagai bagian dari upaya menjaga keamanan nasionalnya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini akan membahas mengenai dinamika geopolitik dalam konflik pembangunan Grand Ethiopian Renaissance Dam (GERD) antara Ethiopia dan Mesir, menganalisis kepentingan nasional kedua negara dalam perebutan sumber daya air Sungai Nil, serta mengkaji peran African Union (AU) dalam proses mediasi konflik tersebut. Selain itu, penelitian ini juga akan menggunakan perspektif teori realisme untuk memahami bagaimana faktor kekuasaan, keamanan, dan kepentingan nasional memengaruhi hubungan antara Ethiopia dan Mesir dalam menghadapi isu pengelolaan Sungai Nil.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada upaya memahami dan menjelaskan fenomena sosial-politik yang terjadi dalam konflik pembangunan Grand Ethiopian Renaissance Dam (GERD) antara Ethiopia dan Mesir. Penelitian ini tidak bertujuan untuk melakukan pengukuran statistik maupun pengujian hubungan antarvariabel secara kuantitatif, melainkan untuk menganalisis secara mendalam mengenai dinamika geopolitik, kepentingan nasional negara, serta peran organisasi regional dalam proses penyelesaian konflik. Melalui pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini berupaya memberikan pemahaman mengenai bagaimana faktor geografis, sumber daya alam, dan kepentingan politik memengaruhi hubungan antara Ethiopia dan Mesir dalam pengelolaan Sungai Nil.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi literatur dengan menggunakan data sekunder sebagai sumber utama penelitian. Data sekunder dipilih karena informasi yang digunakan berasal dari berbagai dokumen dan sumber yang telah tersedia sebelumnya, sehingga dapat digunakan untuk menganalisis perkembangan konflik secara historis maupun kontemporer. Sumber data dalam penelitian ini meliputi dokumen resmi terkait perjanjian pengelolaan Sungai Nil, seperti Perjanjian Sungai Nil tahun 1929 dan Perjanjian 1959, Cooperative Framework Agreement (CFA), dokumen resmi serta laporan

mediasi yang dikeluarkan oleh African Union (AU), artikel jurnal ilmiah, buku, laporan penelitian, serta berbagai pemberitaan dari media internasional yang berkaitan dengan pembangunan GERD dan hubungan Ethiopia-Mesir.

Dalam menganalisis konflik pembangunan GERD, penelitian ini menggunakan dua kerangka teori utama, yaitu teori geopolitik air dan teori realisme dalam hubungan internasional. Pertama, teori geopolitik air digunakan untuk memahami bagaimana sumber daya air dapat menjadi faktor strategis yang memengaruhi hubungan antarnegara. Air dalam konteks sungai lintas batas seperti Sungai Nil bukan hanya menjadi kebutuhan dasar masyarakat, tetapi juga menjadi sumber daya yang memiliki nilai politik, ekonomi, dan keamanan. Ketergantungan Mesir terhadap Sungai Nil serta posisi Ethiopia sebagai negara hulu menunjukkan bahwa faktor geografis memiliki pengaruh besar terhadap kebijakan dan strategi kedua negara. Perbedaan kepentingan dalam mengelola sumber daya air tersebut kemudian menciptakan persaingan geopolitik antara Ethiopia dan Mesir.

Dengan menggunakan kedua kerangka teori tersebut, penelitian ini dapat menjelaskan bahwa konflik GERD tidak hanya disebabkan oleh perbedaan teknis mengenai pengelolaan air, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor kepentingan nasional, keamanan, pembangunan ekonomi, serta persaingan geopolitik antara Ethiopia dan Mesir. Pendekatan ini diharapkan mampu memberikan analisis yang lebih menyeluruh mengenai dinamika konflik sumber daya alam dalam hubungan internasional.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Konflik antara Ethiopia dan Mesir terkait pembangunan Grand Ethiopian Renaissance Dam (GERD) tidak dapat dipahami hanya sebagai konflik mengenai pengelolaan sumber daya air, tetapi juga sebagai persaingan kepentingan nasional yang berkaitan dengan keamanan, pembangunan ekonomi, dan posisi geopolitik kedua negara. Sungai Nil memiliki nilai strategis yang sangat besar bagi kedua negara karena menjadi sumber daya utama yang mendukung keberlangsungan kehidupan masyarakat dan aktivitas ekonomi. Mesir merupakan negara yang berada di kawasan Afrika Utara dan wilayahnya membentang sepanjang aliran Sungai Nil. Sungai Nil menjadi sumber kehidupan utama bagi masyarakat Mesir karena sekitar 90% kebutuhan air nasional bergantung pada aliran sungai tersebut. Sebagian besar air Sungai Nil digunakan untuk sektor pertanian, dengan sekitar 85–90% pemanfaatan air sungai dialokasikan untuk kegiatan pertanian (Bastiaanssen et al., 2014). Aliran Sungai Nil berperan dalam menyuburkan wilayah Lembah Nil dan Delta Nil yang menjadi pusat produksi pangan Mesir. Berbagai komoditas utama seperti gandum, beras, kapas, dan tebu sangat bergantung pada ketersediaan air dari Sungai Nil.

Selain mendukung sektor pertanian, Sungai Nil juga memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga masyarakat Mesir, mendukung aktivitas industri, transportasi, serta sektor pariwisata. Oleh karena itu, bagi Mesir, Sungai Nil bukan hanya sekadar sumber daya alam, tetapi telah menjadi fondasi utama bagi ketahanan pangan, stabilitas ekonomi, dan identitas nasional. Ketergantungan yang sangat tinggi terhadap Sungai Nil menyebabkan Mesir memandang setiap perubahan terhadap aliran sungai sebagai ancaman langsung terhadap keamanan nasionalnya. Dalam perspektif historis, Mesir memiliki posisi dominan dalam pengelolaan Sungai Nil. Negara ini mempertahankan klaim atas hak penggunaan air berdasarkan perjanjian kolonial antara Inggris-Mesir pada tahun 1929 dan Perjanjian 1959 antara Mesir dan Sudan. Kedua perjanjian tersebut memberikan porsi besar pemanfaatan air kepada Mesir dan Sudan, tetapi tidak melibatkan sebagian besar negara hulu seperti Ethiopia. Kondisi tersebut menyebabkan munculnya perbedaan pandangan antara negara hilir dan negara hulu mengenai prinsip keadilan dalam penggunaan Sungai Nil.

Sementara itu, Ethiopia sebagai negara di kawasan Afrika Timur memiliki posisi strategis karena menjadi sumber utama aliran Nil Biru yang memberikan kontribusi besar

terhadap debit air Sungai Nil. Ethiopia memulai pembangunan Grand Ethiopian Renaissance Dam (GERD) pada April 2011 di Sungai Nil Biru, sekitar 40–45 kilometer dari perbatasan Sudan, tepatnya di wilayah Benishangul Gumuz. Proyek tersebut sepenuhnya berada dalam wilayah kedaulatan Ethiopia sehingga pemerintah Ethiopia melihat pembangunan GERD sebagai hak nasional untuk memanfaatkan sumber daya alam yang dimilikinya. Tujuan utama pembangunan GERD adalah menghasilkan kapasitas pembangkit listrik tenaga air sekitar 6.000 MW, menjadikannya salah satu bendungan terbesar di Afrika dan melebihi kapasitas Bendungan Aswan milik Mesir (Yihdego, Khalil, & Salem, 2017). Ethiopia memandang proyek ini sebagai instrumen pembangunan nasional untuk mengatasi keterbatasan energi, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan, serta memperluas akses listrik masyarakat. Sebelum adanya GERD, sebagian besar penduduk Ethiopia masih mengalami keterbatasan akses terhadap listrik sehingga pembangunan bendungan dianggap sebagai langkah penting untuk mempercepat modernisasi negara.

Selain memenuhi kebutuhan domestik, Ethiopia juga melihat GERD sebagai peluang untuk meningkatkan pengaruh ekonomi di kawasan Afrika Timur. Dengan kapasitas produksi listrik yang besar, Ethiopia memiliki potensi menjadi eksportir energi bagi negara-negara tetangga seperti Sudan, Kenya, dan Djibouti. Hal tersebut dapat memperkuat posisi Ethiopia sebagai aktor penting dalam kawasan Tanduk Afrika serta meningkatkan daya tawarnya dalam hubungan internasional. Namun, pembangunan GERD mendapat penolakan keras dari Mesir karena dianggap dapat mengancam pasokan air nasionalnya. Mesir khawatir proses pengisian dan pengoperasian bendungan akan mengurangi jumlah air Sungai Nil yang mengalir ke wilayahnya, terutama pada masa kekeringan. Berkurangnya pasokan air dapat berdampak langsung terhadap sektor pertanian, ketahanan pangan, dan stabilitas ekonomi Mesir. Oleh karena itu, Mesir menilai bahwa keberadaan GERD harus diatur melalui kesepakatan yang mengikat agar kepentingannya tetap terlindungi.

Selain faktor keamanan air, konflik GERD juga memiliki dimensi ekonomi yang kuat. Pembangunan bendungan tersebut membutuhkan biaya yang sangat besar, yaitu sekitar 4–5 miliar dolar Amerika Serikat. Ethiopia memilih menggunakan strategi pembiayaan mandiri melalui penerbitan obligasi nasional dan kontribusi masyarakat sebagai bentuk simbol kemandirian dalam menjalankan proyek strategis tersebut. Meskipun pendanaan utama GERD berasal dari pemerintah Ethiopia, pembangunan infrastruktur besar di Ethiopia tidak terlepas dari hubungan ekonomi dengan aktor internasional, terutama Tiongkok. Melalui kerja sama ekonomi dan investasi infrastruktur, Tiongkok menjadi salah satu mitra penting Ethiopia dalam mendukung pembangunan nasional. Keterlibatan Tiongkok melalui kebijakan Belt and Road Initiative (BRI) menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur di Afrika memiliki dimensi geopolitik yang lebih luas, karena negara-negara besar berupaya memperkuat pengaruh ekonomi dan politiknya di kawasan tersebut.

Bagi Ethiopia, hubungan ekonomi dengan Tiongkok memberikan peluang untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kapasitas ekonominya. Sementara itu, bagi Tiongkok, kerja sama dengan negara-negara Afrika memberikan akses terhadap pasar baru, sumber daya, serta memperkuat hubungan strategis dengan kawasan yang memiliki posisi geografis penting. Selain Tiongkok, konflik GERD juga menarik perhatian aktor internasional lain seperti Amerika Serikat dan Bank Dunia yang sebelumnya berusaha menjadi mediator antara Ethiopia, Mesir, dan Sudan. Keterlibatan berbagai aktor eksternal menunjukkan bahwa konflik Sungai Nil tidak hanya menjadi persoalan regional, tetapi juga bagian dari dinamika geopolitik global yang melibatkan kepentingan ekonomi dan politik negara-negara besar.

Meningkatnya ketegangan antara Ethiopia dan Mesir membuat African Union (AU) sebagai organisasi regional Afrika ikut berperan dalam proses penyelesaian konflik. AU merupakan organisasi yang beranggotakan 55 negara Afrika dan memiliki tujuan untuk memperkuat kerja sama regional serta menjaga stabilitas di kawasan Afrika. Peran AU dalam

mediasi konflik GERD mulai terlihat pada tahun 2015 setelah adanya Declaration of Principles yang ditandatangani oleh Ethiopia, Mesir, dan Sudan di Khartoum. Meskipun deklarasi tersebut masih bersifat umum, kesepakatan tersebut menjadi dasar awal bagi proses dialog antara ketiga negara.

Pada tahun 2020, setelah kegagalan proses mediasi yang sebelumnya melibatkan Amerika Serikat dan Bank Dunia, AU mengambil peran yang lebih aktif dalam memfasilitasi perundingan. Di bawah kepemimpinan Republik Demokratik Kongo yang saat itu memegang posisi Presiden AU, berbagai pertemuan trilateral dilakukan untuk membahas mekanisme pengisian dan pengoperasian bendungan. Selanjutnya pada tahun 2021, AU kembali mengadakan pertemuan di Kinshasa, Republik Demokratik Kongo. Namun, proses tersebut belum berhasil menghasilkan kesepakatan yang mengikat karena Ethiopia menolak rancangan kesepakatan akhir yang diajukan. Ketegangan semakin meningkat ketika Ethiopia tetap melanjutkan proses pengisian bendungan.

Pada tahun 2023, AU kembali berusaha memperbaiki proses dialog di bawah kepemimpinan Senegal sebagai Presiden AU. Meskipun pertemuan berhasil mempertemukan kembali ketiga negara, kesepakatan permanen tetap belum tercapai. Hingga tahun 2024 ketika Ethiopia mengumumkan bahwa pembangunan GERD telah selesai, Mesir masih menyatakan kekhawatiran terhadap dampaknya terhadap pasokan air Sungai Nil. Sampai saat ini, belum terdapat perjanjian hukum yang mengikat mengenai mekanisme pengisian dan pengoperasian bendungan. Konflik antara Ethiopia dan Mesir menunjukkan karakteristik hubungan internasional yang sesuai dengan perspektif teori realisme. Realisme memandang bahwa negara merupakan aktor utama dalam sistem internasional yang berusaha mempertahankan kepentingan nasional, keamanan, dan kekuasaannya.

Dalam konteks ini, Ethiopia dan Mesir sama-sama menunjukkan perilaku yang berorientasi pada kepentingan nasional masing-masing. Ethiopia memandang GERD sebagai instrumen untuk meningkatkan kekuatan nasional melalui pembangunan ekonomi dan penguasaan sumber daya energi. Sementara itu, Mesir melihat pengamanan Sungai Nil sebagai bagian dari upaya mempertahankan keamanan nasional karena keberlangsungan negaranya sangat bergantung pada sumber daya tersebut.

Dari sudut pandang geopolitik, konflik GERD menunjukkan bagaimana faktor geografis dan sumber daya alam dapat memengaruhi hubungan antarnegara. Menurut Saul Bernard Cohen dalam bukunya *Geopolitics: The Geography of International Relations* (2003), geopolitik melihat hubungan antara kekuatan politik dan ruang geografis dalam sistem internasional. Dalam konflik ini, posisi Ethiopia sebagai negara hulu dan Mesir sebagai negara hilir menciptakan ketergantungan sekaligus persaingan dalam mengendalikan sumber daya air. Air Sungai Nil menjadi instrumen kekuasaan yang menentukan posisi tawar kedua negara. Ethiopia menggunakan pembangunan GERD sebagai simbol kedaulatan dan pembangunan nasional, sedangkan Mesir mempertahankan pengaruhnya untuk menjaga akses terhadap sumber daya yang dianggap vital. Kondisi tersebut menyebabkan kedua negara sulit mencapai kompromi karena masing-masing berusaha mempertahankan kepentingan strategisnya.

Berdasarkan analisis tersebut, penyelesaian konflik GERD membutuhkan pendekatan yang tidak hanya berfokus pada pembagian air, tetapi juga mempertimbangkan kepentingan pembangunan ekonomi dan keamanan kedua negara. African Union perlu memperkuat perannya sebagai mediator dengan mendorong adanya perjanjian yang memiliki kekuatan hukum mengenai mekanisme pengisian dan pengoperasian GERD. Selain itu, kerja sama ekonomi regional dapat menjadi alternatif penyelesaian konflik. Ethiopia dapat tetap memperoleh manfaat ekonomi melalui ekspor energi dari GERD, sementara Mesir memperoleh jaminan keamanan terkait keberlanjutan pasokan air Sungai Nil. Pendekatan berbasis kerja sama energi dan pembangunan bersama dapat mengurangi persepsi ancaman serta membuka peluang hubungan yang lebih stabil antara negara-negara di kawasan Sungai

Nil. Dengan demikian, konflik GERD menunjukkan bahwa pengelolaan sumber daya alam strategis dalam hubungan internasional tidak hanya berkaitan dengan aspek lingkungan, tetapi juga mencakup kepentingan ekonomi, keamanan, dan geopolitik. Penyelesaian konflik membutuhkan keseimbangan antara hak pembangunan Ethiopia dan kebutuhan keamanan air Mesir agar tercipta stabilitas jangka panjang di kawasan Afrika Timur Laut.

D. KESIMPULAN

Konflik antara Ethiopia dan Mesir terkait pembangunan Grand Ethiopian Renaissance Dam (GERD) memperlihatkan bagaimana pengelolaan sumber daya air lintas negara dapat menjadi sumber ketegangan geopolitik yang kompleks. Pembangunan GERD oleh Ethiopia sejak 2011 mencerminkan upaya negara tersebut untuk mewujudkan kemandirian energi, mempercepat pertumbuhan ekonomi, serta meningkatkan posisi tawarnya di kawasan Afrika Timur. Ethiopia menganggap proyek ini sebagai proyek tersebut. Sementara itu, Ethiopia menekankan hak nya untuk memanfaatkan sumber daya alamnya sendiri demi pembangunan nasional. Dengan demikian, konflik GERD antara Ethiopia dan Mesir merupakan contoh nyata bagaimana faktor geografis dan kepentingan nasional dapat memicu ketegangan geopolitik di kawasan hak berdaulat untuk memanfaatkan sumber daya alamnya sendiri, terutama dalam konteks pembangunan nasional dan pengentasan kemiskinan. Sebaliknya, Mesir yang secara historis bergantung hampir sepenuhnya pada aliran Sungai Nil untuk memenuhi kebutuhan domestik, irigasi pertanian, dan menopang stabilitas ekonominya, melihat GERD sebagai ancaman langsung terhadap survival negaranya. Sikap Mesir dalam mempertahankan hak historis atas air Sungai Nil didasarkan pada perjanjian kolonial 1929 dan 1959, yang menurut Ethiopia sudah tidak relevan dengan dinamika kontemporer.

Upaya mediasi yang dilakukan African Union (AU) dari 2015 hingga 2025 memperlihatkan adanya keterbatasan kelembagaan regional dalam menyelesaikan sengketa yang melibatkan kepentingan vital negara-negara anggotanya. Meskipun AU telah berupaya mengorganisasi beberapa putaran negosiasi termasuk deklarasi prinsip 2015 dan pertemuan-pertemuan lanjutan hingga kini belum tercapai kesepakatan hukum yang mengikat. Ethiopia dan Mesir tetap menunjukkan perilaku realistis dalam hubungan internasional: memprioritaskan kepentingan nasional, mempertahankan kedaulatan, dan bersikap skeptis terhadap kerja sama multilateral yang dianggap berpotensi mengurangi kontrol mereka atas sumber daya strategis.

Konflik ini menegaskan bahwa kontrol atas sumber daya air lintas negara tidak hanya menyangkut aspek lingkungan dan pembangunan, melainkan juga berkaitan erat dengan kekuasaan politik, stabilitas nasional, dan eksistensi negara. Sungai Nil, sebagai sumber daya vital, telah menjadi alat diplomasi sekaligus medan persaingan geopolitik antara negara hulu dan hilir. Penyelesaian konflik GERD membutuhkan pendekatan diplomasi kreatif yang melampaui kerangka tradisional perundingan. Diperlukan mekanisme kerja sama yang lebih kuat, transparansi dalam pengelolaan air, serta komitmen politik dari kedua negara dan organisasi regional seperti AU untuk menjamin keadilan distribusi sumber daya dan mencegah eskalasi lebih lanjut. Tanpa adanya solusi yang adil dan berkelanjutan, sengketa ini berisiko memperburuk ketidakstabilan di kawasan Afrika Timur dan Utara, sekaligus menjadi preseden bagi konflik serupa di wilayah sungai lintas negara lainnya di dunia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abteu, W. (2021). The grand ethiopian renaissance dam: evaluation of filling and operation plans and negotiations. *In Nile and Grand Ethiopian renaissance dam: past, present and future* (pp. 245-272). Cham: springer international publishing.
- Al-Ajamee, M., Baboo, A., & Kolathayar, S. (2022, August). Deterministic seismic hazard

- analysis of Grand Ethiopia Renaissance Dam (gerd). In *conference on performance-based design in earthquake. Geotechnical engineering* (pp. 1903-1913). Cham: springer international publishing.
- Anindita, V., & Nugraha, I. F. (2025). Diplomasi iklim dan keamanan lingkungan dalam sengketa GERD: studi kasus Ethiopia, Sudan, dan Mesir. *Jurnal Integrasi Pengetahuan Disiplin*, 6(3).
- Apipudin, A., & Inayah, A. F. Konflik hidropolitik sungai nil antara Mesir dan Ethiopia. *Multikultura*, 1(3), 13.
- Asmarani, N. (2019). *Upaya Ethiopia dalam Pembangunan Grand Ethiopian Renaissance Dam (GERD) di Sungai Nil Biru Terhadap Status Quo Mesir Tahun 2015–2018* (Bachelor's thesis, FISIP UIN Jakarta).
- Badaruddin, M. (2020). *Signifikansi Energi dalam Dinamika Geopolitik di Timur Tengah* (Universitas Bakrie).
- Bombelli, G. M., Tomiet, S., Bianchi, A., & Bocchiola, D. (2021). Impact of prospective climate change scenarios upon hydropower potential of Ethiopia in GERD and GIBE dams. *Water*, 13(5), 716.
- Darmawan, A. B., & Nashir, A. K. (2023). *Studi kawasan Timur Tengah: antara perdamaian dan konflik*. Deepublish.
- De Falco, S., & Fiorentino, G. (2022). The GERD dam in the water dispute between Ethiopia, Sudan and Egypt. A scenario analysis in an ecosystem approach between physical and geopolitical geography. *AIMS GEOSCIENCES*, 8(2), 233-253.
- De Souza, V. H. G., & Jara, E. P. (2023). The Dispute Over The Nile River Involving The Grand Ethiopian Renaissance Dam Sengketa Sungai Nil yang Melibatkan Bendungan Grand Renaissance Ethiopia. *Jejaring Administrasi Publik*, 15(2), 79-92.
- Fahrurizal, L. Penolakan Mesir Terhadap Pembangunan Grand Ethiopian Renaissance Dam Pada Periode 2013-2020 (Bachelor's Thesis, Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam).
- Gebresenbet, F., & Wondemagegnehu, D. Y. (2021). New dimensions in the Grand Ethiopian Renaissance Dam negotiations: ontological security in Egypt and Ethiopia. *African Security*, 14(1), 80-106.
- Harmiyati, H. (2021). *Dinamika hubungan internasional di Timur Tengah*. Yogyakarta: UPN "Veteran" Yogyakarta.
- Herdianti, B. N., & Susiatiningsih, R. H. (2023). Sebuah Ironi: Kegagalan Amerika Serikat dan Bank Dunia dalam Upaya Menyelesaikan Konflik Bendungan GERD. *Jurnal Hubungan Internasional*, 16(2).
- Kahsay, T. N., Kuik, O., Brouwer, R., & Van Der Zaag, P. (2015). Estimation of the transboundary economic impacts of the Grand Ethiopia Renaissance Dam: A computable general equilibrium analysis. *Water Resources and Economics*, 10, 14-30.
- Mlambo, V. H., & Masuku, M. M. (2025). Trouble in the Nile basin: Ethiopia, Egypt, and Sudan and the Nile stalemate. *Cogent social sciences*, 11(1), 2491851.
- Mohamed, N. N. (2018). Continuous dispute between Egypt and Ethiopia concerning Nile water and mega dams. In *Grand Ethiopian Renaissance Dam Versus Aswan High Dam: A View from Egypt* (pp. 451-483). Cham: Springer International Publishing.
- Mohamed, Y. A., & Abdalla, S. H. (2025). The negotiations around the Grand Ethiopian Renaissance Dam (GERD): A sudanese perspective. *Water International*, 50(6), 535-559.
- Nabila, K. F. (2025). *Konflik Kepentingan Pembangunan dan Keamanan Air: Analisis Sengketa Grand Ethiopian Renaissance Dam antara Mesir dan Ethiopia* (Universitas Muhammadiyah Yogyakarta).

- Putra, D. B. (2023). *Diplomasi air mesir dalam merespon pembangunan Grand Ethiopian Renaissance Dam (GERD) di Ethiopia* (Skripsi Universitas Lampung).
- Rahayu, S. (2023). *Analisis Kebijakan Ethiopia dalam Upaya Pembangunan Grand Ethiopian Renaissance Dam di Sungai Nil Ditinjau dari Teori Pengambilan Keputusan Oleh Richard Snyder Tahun 2011-2015* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).
- Rahmawati, A., & Gea, M. T. (2022). Strategi Mesir Menghadapi Ancaman Pembangunan Grand Ethiopian Renaissance Dam (Gerd). *Jurnal Transformasi Global*, 9(1), 14-23.
- Ramadhan, M. F. R. (2024). The Grand Ethiopian Renaissance Dam and the shifting balance of power in The Horn of Africa. *Global: Jurnal Politik Internasional*, 26(2), 1-24.
- Ratugenuita, I., & Marsingga, P. (2025). Proxy War di Ethiopia-Tigray: analisis dampak keterlibatan peran aktor eksternal terhadap upaya resolusi konflik oleh Uni Afrika. *Kajian Hubungan Internasional*, 4(1), 73-84.
- Saputra, Y. W., & Azmi, M. (2022). *Geografi sejarah peradaban dunia kuno*. Samarinda: Borneo Riset Edukasi.